
Ciuta Ekonomika

Jurnal Ekonomi

Volume VIII, Nomor 1, Mei 2014
ISSN: 1978-3612

Terbit dua kali setahun, pada bulan Mei dan Desember, berisi tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian ilmiah di bidang ilmu ekonomi dalam berbagai aspek kajian

Pemimpin Redaksi:

Maryam Sangadji

Wakil Pemimpin Redaksi:

Yerimias Manuhutu

Redaktur Pelaksana:

Jeann B. Nikijuluw
Mohammad R. Serang

Wakil Redaktur Pelaksana:

Bin Raudha Hanoeboen
Aziz Laitupa

Tim Editor:

Maria K. Tupamahu
Sherly Ferdinandus
Mohammad Ridwan Assel

Penyunting Ahli:

Stellamaris Metekohy
Latif Kharié
Erly Leiwakabessy
Asmaria Latuconsina
H. Muspida
Muhammad Bugis



**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Pattimura**

Alamat Redaksi

Lt.2 Kampus Fak. Ekonomi Unpatti
Jln. Ir. M. Putuhena, Poka-Ambon
K.P. 97233, Telp 0911-322579
e-mail: cita.ekonomika@gmail.com

Redaksi menerima sumbangan artikel yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Format artikel harus sesuai dengan petunjuk penulisan yang tercantum di halaman belakang jurnal ini. Naskah yang masuk akan dievaluasi, ditelaah dan disunting untuk menyeragamkan format penulisan, gaya selingkung serta demi menjaga kualitas isi jurnal

PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DI PROPINSI MALUKU

JEANEE B NIKIJULUW

Abstract

This research aimed to know disparity of economic growing in Maluku province between Regency. The data was analysed with Klassen Tipology, Williamson Index, Entrophy Theill Index. From the research, can conclusion that only Ambon City in First quadran (high growth and high income). The area that categorize into high growth but low income is Tual City. Bursel Regency can categorized into high income but low growth and low growth and low income are, MBD,MTB,Malra,Malteng,Buru,SBT,SBB and ARU Regency. In Williamson Indeks and Entropi Theil Indeks got different answer. According to Williamson Index Maluku Province have decreasing disparity in growing of economic but Entrophy Theill index categorized that Maluku Province have increasing disparity og growing in economic.

Keywords: growth, disparity, Williamson Index, Entrophy Theill Index.

I. PENDAHULUAN

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh masing-masing orang, daerah satu dan lainnya maupun negara satu dengan lainnya. Penting bagi kita untuk dapat memiliki definisi yang sama dalam mengartikan pembangunan. Secara traditional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestik Produk (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada PDRB suatu provinsi, kabupaten dan kota.

Namun muncul kemudian alternatif definisi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada kemampuan suatu Negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu Negara atau kita kenal dengan istilah industrialisasi. Kontribusi pertanian mulai digantikan dengan kontribusi industri.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Arsyad, 1999 ; Blakely E.J,1989). Tolok ukur keberhasilan pembanguan data dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.

Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Pakar ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakekat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Ahli ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan (Produk Domestik Bruto) PDB dan PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Arsyad 1999).

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Development Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdevelopment Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ketimpang ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi melainkan juga pada antar pulau jawa dan luar pulau jawa, Kawasan Barat Indonesia (Kabarin) dan Kawasan Timur Indonesia (Katimin). Berbagai program yang dikembangkan untuk mengurangi maupun menghilangkan ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai.

Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tampaknya perlu diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi, 1997). Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan

menyebabkan pengaruh negatif yang lebih mendominasi sehingga berdampak pada ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan dipasar secara normal akan cenderung meningkatkan bukannya menurun, sehingga akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan antar daerah. Tujuan pertama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Pradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan tradisional. Beberapa ekonomi modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriak para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan yang mulai menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2003).

Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan atau antar wilayah. Pendapatan per kapita rata-rata suatu daerah dapat disederhanakan menjadi Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan mendasarkan kepada pendapatan personal yang didekati dengan pendekatan konsumsi (Widiarto, 2001). Dalam pengukuran ketimpangan pembangunan ekonomi regional digunakan Indeks Williamson.

Pembangunan dalam lingkup Negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecenderungan pemilik modal (*investor*) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil. Disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pendapatan dari pemerintah pusat atau propinsi kepada daerah seperti propinsi atau kecamatan (Kuncoro, 2004).

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi/daerah yang cukup kaya dengan hasil bumi baik di darat maupun di laut. Namun pemanfaatan sumber-sumber alam tersebut belum

semaksimal mungkin, karena berbagai macam kendala yang dihadapi seperti masalah sumber daya manusia maupun infrastruktur yang menunjang dalam pengolahan dan pengembangan sumber alam tersebut.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada latar belakang maka yang menjadi fokus penelitian dengan permasalahan sebagai berikut a) Bagaimana pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku?, dan b) bagaimana ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Produk Domesti Regional Bruto) per kapita serta untuk mengetahui ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Maluku.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu sasaran pembangunan. Pembangunan dalam arti luas mencakup aspek kehidupan baik ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali dengan pendapatan riil perkapita (Irawan dan Suparmoko, 1997). Selanjutnya, pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan merupakan penerimaan dan timbulnya dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Laju pembangunan ekonomi suatu negara diukur dengan menggunakan tingkat pertumbuhan GDP/GNP (Arsyad, 1997).

Todaro (2004) menjelaskan lima pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi, yaitu : Teori tahapan linier dan pembangunan sebagai pertumbuhan; model perubahan struktural; revolusi ketergantungan internasional; kontrarevolusi neoklasik dan teori pertumbuhan baru. Model Pertumbuhan Harold-Domar atau sering disebut model pertumbuhan AK termasuk dalam teori tahapan linear.

Menurut Sukirno (1998) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Penilaian mengenai cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi haruslah dibandingkan dengan pertumbuhan di

masa lalu dan pertumbuhan yang dicapai oleh daerah lain (Sukirno, 1998). Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Sedangkan dikatakan mengalami pertumbuhan yang lambat apabila dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau fluktuatif.

2.2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Wilayah

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro, 2004).

Berbagai penelitian tentang ketimpangan antar daerah telah banyak dilakukan. Kuznets (1954) tercatat sebagai salah satu peneliti awal dalam menelitikesenjangan. Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara cross-sectional dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali.

Myrdal (1957) melakukan penelitian tentang sistem kapitalis yang menekankan kepada tingkat keuntungan bagi suatu wilayah yang memberikan harapan tingkat keuntungan tinggi akan berkembang menjadi pusat-pusat perkembangan kesejahteraan. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyard, 1999).

Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris tahun 1973 (Arsyad,1997) menyatakan bahwa faktor penyebab ketimpangan pendapatan di Negara sedang berkembang adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan turunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi. Dimana penerimaan pendapatan yang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertumbuhan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*).

5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar bagi mata uang negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat ketidakelestarian barang- barang ekspor dari negara sedang berkembang
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Tambunan (2001) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah antara lain :

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Semakin tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah.
2. Alokasi Investasi. Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain bahwa kurangnya investasi disuatu wilayah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah, karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
3. Tingkat Mobilitas dan faktor-faktor produksi yang rendah antar daerah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi regional.
4. Perbedaan Sumberdaya Alam antar daerah. Dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumberdaya alamnya akan lebih cepat maju dibandingkan dengan daerah yang miskin sumberdaya alam.
5. Perbedaan kondisi demografis antar wilayah. Ketimpangan ekonomi regional juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi permintaan dan penawaran.
6. Kurang lancarnya perdagangan. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur-unsur yang turut menciptakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Ketidklancaran tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada kesenjangan antarwilayah di dalam negara. Williamson menghubungkan kesenjangan pendapatan rata-rata antarwilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah. Dalam penelitian ini untuk menghitung disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah di gunakan indeks ketimpangan Williamson.

Selain dengan indeks Williamson ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi, Ying menggunakan indeks ketimpangan regional. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi/diurai menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah (Within) dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional (Between). Dengan menggunakan alat analisis indeks Entropi Theill akan diketahui ada tidaknya ketimpangan antar kabupaten/kota yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah (Ying, 2000) dikutip dalam Sutarno.

III. METODOLOGI PENELITIAN.

Penelitian ini dilakukan pada daerah provinsi Maluku. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang di peroleh dari pihak terkait. Data yang diperlukan antara lain data berupa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), data berupa sensus social ekonomi masing-masing kabupaten dan Propinsi Maluku, pendapatan per kapita dari masing-masing kabupaten dan Propinsi Maluku. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah adalah matriks Tipologi Klassen. Kriteria yang digunakan terdiri dari empat:
 - a) Kuadran I (pertama) yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*) adalah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi di bandingkan dengan Propinsi Maluku
 - b) Kuadran II (kedua) yakni maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan Propinsi Maluku
 - c) Kuadran III (ketiga) yakni berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Propinsi Maluku

- d) Dan kuadran IV (keempat) adalah daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan dengan Propinsi Maluku

Tabel 1.
Matriks Klassen Typology

Y	$y_i > Y$	$y_i < Y$
R	Kuadran I	Kuadran II
$r_i > R$	Kuadran III	Kuadran IV
$r_i < R$		

Sumber: Trividodo ((2006)

2. Analisis ketimpangan ekonomi antar daerah digunakan 2 jenis analisis yakni ;
- a) Indeks ketimpangan Williamson (syafrizal, 2008) yakni analisis yang digunakan sebagai Indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) dengan rumus sebagai berikut :

$$Vw = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

Dimana :

Y_i : PDRB per kapita di kabupaten i

\bar{Y} : PDRB per kapita rata-rata di Propinsi Maluku

f_i : Jumlah Penduduk di kabupaten i

n : jumlah penduduk di Propinsi Maluku

Dengan indikator bahwa apabila angka indeks ketimpangan Williamson semakin mendekati nol maka menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil dan bila angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol maka menunjukkan ketimpangan yang makin melebar.

- b) Indeks Entropi Theil yang merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan dan konsentrasi industry yang menawarkan tentang pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapat. Adapun rumusan dari indeks entropi theil adaah sebagai berikut (L.G. Ying 2000) :

$$I_{(y)} = \sum (y_j / Y) \times \log \{ (y_j / Y) / X_j / X \}$$

Dimana :

$I_{(y)}$: indeks entropi theil

y_j : PDRB per kapita kabupaten j

Y : rata-rata PDRB per kapita Propinsi Maluku

X_j : jumlah penduduk kabupaten j

X : jumlah penduduk Propinsi

Dengan indicator bahwa apabila semakin besar nilai indek entropi theil maka semakin besar ketimpngan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai indek maka semakin merata terjadinya pembangunan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pola dan Struktur Ekonomi Propinsi Maluku

Untuk mengetahui klasifikasi daerah didasarkan kepada dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Dengan menggunakan tipologi klasen yang terbagi atas empat kuadran. Pada kuadran I terdiri dari daerah kabupaten yang maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*, kuadaran ke II daerah kabupaten maju tapi tertekan (*high income but low growth*), kuadran III daerah kabupaten yang berkembang cepat (*high growth but low income*), dan kuadaran ke IV daerah kabupaten yang relative tertinggal (*low growth and low income*).

Berdasarkan hasil penelitian selama periode tahun 2009 hingga tahun 2012, dapat diketahui bahwa sebagian besar daerah kabupaten di Propinsi Maluku merupakan daerah yang masih terkebelakang atau relatif tertinggal hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan perkapita yang dimiliki daerah kabupaten tersebut jauh di bawah rata-rata dari daerah propinsi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.
Matriks Klassen Tipology

R \ Y	$y_i > Y$	$y_i < Y$
$r_i > R$	Kuadran I Kota Ambon	Kuadran II Kota Tual
$r_i < R$	Kuadran III Buru Selatan	Kuadran IV MTB, MBD, Malra, Buru, Malteng, SBB, SBT, Aru,

Sumber: data diolah

Pada tabel 2, diketahui bahwa Kota Ambon merupakan daerah yang maju dan berkembang pesat karena Kota Ambon merupakan ibukota propinsi dimana seluruh fasilitas publik tersedia dibandingkan daerah kabupaten/kota yang lainnya. Yang tergolong daerah

berkembang adalah Kota Tual, sedangkan daerah kabupaten Buru Selatan terletak di kuadran III yang merupakan daerah maju tapi tertekan. Selama tahun 2009-2012 rata-rata PDRB Per Kapita Propinsi Maluku adalah 2,566,126. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya adalah 6,30%. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB Per Kapita diatas rata-rata propinsi Kota Ambon yaitu 5,207,962, sedangkan sepuluh daerah kabupaten/kota lainnya memiliki rata-rata di bawah daerah Propinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Rerata Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rerata PDRB Perkapita
Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku, Tahun 2009-2012

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Perkapita
1. Maluku Tenggara Barat	5.81	2,469,935
2. Maluku Barat Daya	5.64	2,443,334
3. Maluku Tenggara	5.90	2,111,205
4. Kota Tual	6.46	2,413,301
5. A r u	5.72	2,266,218
6. Maluku Tengah	6.13	1,571,063
7. Seram Bagian Barat	5.41	1,777,489
8. Seram Bagian Timur	5.50	1,399,158
9. Pulau Buru	5.79	1,511,728
10. Buru Selatan	5.37	2,069,185
11. Kota Ambon	6.90	5,207,962
Propinsi Maluku	6.30	2,566,126

Sumber: data diolah

4.2. Ketimpangan Ekonomi antar Daerah

Ketimpangan pembangunan memang merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan komponen masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih baik, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berulang dengan signifikan.

Ketimpangan pembangunan antar daerah atau antar kabupaten di Propinsi Maluku selama tahun 2003-2005 dapat dianalisis dengan menggunakan indeks Williamson (sjafrizal,2005). Apabila angka indeks kesenjangan Williamson semakin mendekati nol, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin kecil dan bila angka indeks menunjukkan semakin mendekati satu maka menunjukkan kesenjangan yang makin melebar. Safrizal

menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada kesenjangan level rendah, sedang, atau tinggi. Berikut ini adalah kriterianya:

- a. Kesenjangan level rendah, jika $IW < 0,35$
- b. Kesenjangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$
- c. Kesenjangan level tinggi, jika $IW > 0,5$

Tinggi rendahnya nilai indeks Williamson (IW) mengandung arti bahwa telah ketimpangan antar daerah kabupaten/kota di Propinsi Maluku dengan berbagai tingkatan. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa indeks ketimpangan PDRB Per Kapita antar kabupaten/kota di Propinsi Maluku selama periode 2009-2012 rata-rata sebesar 0,099. Ketimpangan yang terjadi di kabupaten/kota Propinsi Maluku di kategorikan dalam ketimpangan rendah karena nilai indeksnya kurang dari 0,35, kecuali Kota Ambon memiliki nilai indeks lebih besar dari rata-rata daerah propinsi sebesar 0,585.

Tabel 4
Indeks Williamson antar Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku
Tahun 2009-2012

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-Rata IW
	2009	2010	2011	2012	
1. Maluku Tenggara Barat	0.016	0.021	0.021	0.021	0.020
2. Maluku Barat Daya	0.006	0.019	0.020	0.022	0.017
3. Maluku Tenggara	0.037	0.018	0.015	0.013	0.021
4. Kota Tual	0.021	0.007	0.006	0.007	0.010
5. A r u	0.017	0.002	0.002	0.000	0.005
6. Maluku Tengah	0.187	0.149	0.143	0.139	0.155
7. Seram Bagian Barat	0.084	0.072	0.069	0.072	0.074
8. Seram Bagian Timur	0.090	0.100	0.100	0.102	0.098
9. Pulau Buru	0.079	0.092	0.094	0.095	0.090
10. Buru Selatan	0.022	0.016	0.017	0.018	0.018
11. Kota Ambon	0.656	0.562	0.559	0.563	0.585
RATA-RATA Maluku	0.110	0.096	0.095	0.096	0.099

Sumber : data diolah

Hampir semua daerah Kabupaten/kota yang memiliki nilai Indeks Williamson berada dibawah rata-rata indeks propinsi, mengandung arti bahwa secara rata-rata tingkat PDRB Per Kapita antar kabupaten/kota relative lebih merata jika dibandingkan di daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.

Rendahnya nilai Indeks Williamson antar daerah kabupaten/kota bukan berarti secara otomatis menerangkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (nilai IW rendah) lebih baik dari daerah lainnya (nilai IW lebih tinggi dari rata-rata propinsi). Indeks

Williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB Perkapita antar daerah kabupaten/kota di Propinsi Maluku.

Untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan /kesenjangan suatu daerah selain memakai Indeks Williamson juga dapat menggunakan Indeks Entropi Theil. Indeks Entropi Theil pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi industry. Dari hasil penelitian didapatkan nilai Indeks Entropi Theil periode tahun 2009-2012, rata-rata sebesar 1,128. Nilai Indeks Entropi Theil rata-rata selama periode penelitian mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5.
Indeks Entropi Theil antar Kabupaten /Kota
Di Propinsi Maluku, Tahun 2009-2012

Kabupaten/Kota	Tahun				Rata-rata $I_{(y)}$
	2009	2010	2011	2012	
1. Maluku Tenggara Barat	1.290	1.271	1.297	1.297	1.289
2. Maluku Barat Daya	1.266	1.333	1.516	1.526	1.410
3. Maluku Tenggara	0.927	1.007	1.108	1.120	1.041
4. Kota Tual	1.633	1.593	1.474	1.481	1.545
5. A r u	1.134	1.177	1.278	1.355	1.236
6. Maluku Tengah	0.247	0.294	0.337	0.345	0.306
7. Seram Bagian Barat	0.622	0.644	0.686	0.676	0.657
8. Seram Bagian Timur	0.647	0.613	0.587	0.579	0.607
9. Pulau Buru	0.709	0.670	0.619	0.613	0.653
10. Buru Selatan	1.223	1.251	1.283	1.273	1.257
11. Kota Ambon	2.742	2.508	2.186	2.199	2.409
Rata-rata Maluku	1.131	1.124	1.125	1.133	1.128

Sumber : data diolah

Nilai Indeks Entropi Theill yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula, demikian pula sebaliknya, bila nilai indeks Entropi Theill semakin mengecil dengan kata lain semakin merata. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan di Propinsi Maluku selama periode tahun 2009-2012 menurut Indeks Entropi Theill maka ketimpangan masih rendah. Tingkat kesenjangan hanya berkisar antara 0,306 hingga 2,409. Tingkat kesenjangan tertinggi berada di Kota Ambon, sedangkan tingkat kesenjangan terendah berada di daerah Kabupaten Maluku Tengah.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

1. Berdasarkan struktur pertumbuhan ekonomi daerah Propinsi Maluku, yang termasuk dalam daerah maju dan berkembang cepat adalah Kota Ambon, hal ini ditunjukkan dengan besarnya pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan yang dimilikinya. Sedangkan Kota Tual tergolong dalam daerah yang sedang berkembang dan Kabupaten Buru Selatan tergolong dalam daerah yang maju tetapi tertekan. Sedangkan daerah lainnya seperti MTB, MBD, Malra, Kep Aru, Pulau Buru, SBB, SBT dan Malteng tergolong dalam daerah yang tertinggal
2. Selama periode pengamatan tahun 2009-2012, terjadi ketimpangan pembangunan yang tidak signifikan berdasarkan Indeks Williamson, sedangkan menurut Indeks Entropi Theill, ketimpangan pembangunan boleh dikatakan kecil yang berarti masih terjadinya pemerataan pembangunan setiap tahunnya selama periode pengamatan.

5.2. Saran.

1. Kabupaten yang relative tertinggal perlu mendapat perhatian dari pemerintah serta di dukung oleh masyarakat.
2. Kepada pemerintah propinsi sebaiknya memperbesar ekspansi pembangunan kedaerahnya masing-masing baik dari segi ekonomi maupun dari segi fasilitas agar terjadi pemerataan pembangunan sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antar masing-masing daerah kabupaten/kota di propinsi Maluku.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln.**,1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah , Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Blakely, E. J.** 1989. Planning Local Economic Development: Theory and Practice . California: SAGE Publication, Inc
- Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad.** 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia , Vol. 17, No. 1, 2002, 27 - 45
- _____. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta
- _____. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta
- Majidi, N.** 1997. Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah . Prisma, LP3S
- Sjafrizal.** 2008 Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Baduouse Media, Sumatra Barat
- Sukirno, Sadono.** 1998. Ekonomi Pembangunan . Jakarta: LPFE-UI

Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tri Widodo 2006, *Perencanaan Pembangunan, Aplikasi computer (Era Otonomi Daerah)*, UPP STIM YKPN Yogyakarta